

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472. *Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

_____. *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*. UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

_____. *Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960, LN Nomor 156 Tahun 1960, TLN Nomor 2104.

_____. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.

_____. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.

_____. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 4 Tahun 1998, LN Nomor 135 Tahun 1998, TLN Nomor 3778.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. PP Nomor 17 Tahun 1999, LN Nomor 30 Tahun 1999, TLN Nomor 3814 *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001*, LN Nomor 71 Tahun 2001, TLN Nomor 4102.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur*. PP Nomor 10 Tahun 2005, LN Nomor 27 Tahun 2005, TLN Nomor .

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keppres Nomor 15 Tahun 2004.

_____. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keppres Nomor 15 Tahun 2004. *sebagaimana telah di 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005*. Keppres Nomor 5 Tahun 2005.

B. Buku Teks Hukum

Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Badruljaman Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Djiwandono, J. Soedradjad, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001.

Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

H. M. Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Yayasan Tritura, 1966.

John Stuart Mill, *Perihal Kebebasan, Kata Pengantar dan Penerjemah: Alex Lanur ed.1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, *Materi Kuliah Filsafat Hukum Buku I*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Kasim, M. Ali Said, *BPPN dan BLBI: Sebuah Rekonstruksi Periode Awal Penyelamatan Perbankan Nasional*, Jakarta: Bank Indonesia, 2003.

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lontoh Rudhy A, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

_____. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

———. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muljadi, Kartini dan Gunawan widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

———. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, 2006.

Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.

———. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

———. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

———. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*, Bandung: 2001.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Suta, I Putu Gede Ary dan Soebowo Musa., *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, Jakarta: Penerbit Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003.

Suta, I Putu Gede Ary dan Soebowo Musa., *BPPN The End*, Jakarta: Penerbit Yayasan Sad Satria Bhakti, 2004.

Subekti R., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

———. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1978.

———. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985.

———. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1968.

Subekti R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985.

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam KUH Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia : Insentif v. Pembatasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008.

Sri S.M. Sofwan, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sjahdeini, Sutan Remy., *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

———. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillessements verordening junto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1998.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Valerine J.L.K, *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Depok: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008 .

Widiyono, Try., *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

C. Majalah/Jurnal/Paper

Juwana, Hikmahanto., *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.1-3 Tahun XXVII, Januari-Juni 1998.

Radjagukguk, Erman., *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis No. II Vol. 6.

Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Buku Putih : Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Jakarta, 2010.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, Laporan Nomor 34/XII/11/2006, Jakarta 2006.

D. Artikel Internet

Detik Finance, *Kronologi Membengkaknya Bailout Bank Century oleh LPS*, <http://www.detikfinance.com/read/2009/08/31/061649/1192723/5/kronologi-membengkaknya-bailout-bank-century-oleh-lps>.

Kompas, *Angket Century siap*, <http://sains.kompas.com/read/2009/11/12/05165799/Angket.Century.Siap>.

Kompas, *Angket Century Resmi Diusulkan*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/13/02473986/angket.century.resmi.diusulkan>.

Kompas, *Kronologi Di Balik Penyelamatan Century Versi Boediono*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/22/15505353/Kronologi.di.Balik.Penyelamatan.Century.Versi.Boediono.1>.

Oke Zone, *Kronologi Penanganan Bank Century Versi Menkeu*, <http://autos.okezone.com/read/2009/08/27/320/251925/320/kronologi-penanganan-bank-century-versi-menkeu>.

Surya Online, *Hak Angket Century Disetujui*, <http://www.surya.co.id/2009/12/01/hak-angket-century-disetujui.html>.

TVOne, *Panitia Angket Century Akan Susun Rencana Kerja*, http://www.tvone.co.id/berita/view/29172/2009/12/06/panitia_angket_century_akan_susun_rencana_kerja/.

Tempo Interaktif, *Kronologi Aliran Rp6,7 Triliun Ke Bank Century*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/11/14/brk,20091114-208353.id.html>.

Vivanews, *DPR Pertimbangkan Bentuk Hak Angket Century*, http://bisnis.vivanews.com/news/read/100099-dpr_pertimbangkan_bentuk_hak_angket_century.